



**PENGUMUMAN**  
Nomor 262/DJU/KP3.4.4/II/2024

**TENTANG**

**PENILAIAN KINERJA PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM  
TAHUN 2024**

Untuk mewujudkan integritas yang kuat dan pengadilan yang bermartabat guna memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat pencari keadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan mengadakan kembali penilaian kinerja dan layanan pada satuan kerja di bawahnya, dengan tema **“Peran Pengadilan dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum”**.

Pengusulan satuan kerja adalah berdasarkan penilaian oleh Pengadilan Tinggi yang diusulkan paling lambat tanggal **15 Maret 2024** dengan memperhatikan tabel pengusulan di bawah.

No	Pengadilan Tinggi	Kelas Pengadilan			Total Usulan
		I A Khusus	I A	I B dan II	
1.	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	-	1	2	3
2.	Pengadilan Tinggi Medan	1	1	2	4
3.	Pengadilan Tinggi Padang	-	1	2	3
4.	Pengadilan Tinggi Riau	-	1	2	3
5.	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	-	1	1	2
6.	Pengadilan Tinggi Jambi	-	1	1	2
7.	Pengadilan Tinggi Palembang	1	1	1	3
8.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	-	1	1	2
9.	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	-	1	1	2
10.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	-	1	1	2
11.	Pengadilan Tinggi Jakarta	3	-	-	3
12.	Pengadilan Tinggi Bandung	1	2	2	5
13.	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	1	2	3	6
14.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	-	1	1	2
15.	Pengadilan Tinggi Surabaya	1	2	3	6
16.	Pengadilan Tinggi Banten	1	1	1	3
17.	Pengadilan Tinggi Denpasar	-	1	2	3
18.	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat	-	1	1	2
19.	Pengadilan Tinggi Kupang	-	1	2	3
20.	Pengadilan Tinggi Pontianak	-	1	1	2
21.	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	-	1	1	2

No	Pengadilan Tinggi	Kelas Pengadilan			Total Usulan
		I A Khusus	I A	I B dan II	
22.	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	-	1	1	2
23.	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	-	1	1	2
24.	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara	-	-	1	1
25.	Pengadilan Tinggi Manado	-	1	1	2
26.	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	-	1	1	2
27.	Pengadilan Tinggi Makassar	1	1	2	4
28.	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	-	1	1	2
29.	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara	-	1	1	2
30.	Pengadilan Tinggi Gorontalo	-	1	1	2
31.	Pengadilan Tinggi Ambon	-	1	1	2
32.	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	-	1	1	2
33.	Pengadilan Tinggi Jayapura	-	1	1	2
34.	Pengadilan Tinggi Papua Barat	-	-	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>89</b>

Adapun penilaian yang akan dilaksanakan meliputi:

### 1. Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengusulan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi yang dilengkapi data dukung:

#### a. Tahap 1 (Penilaian Video)

- 1) Video Profil PTSP Pengadilan terbaru dengan durasi maksimal 5 menit yang memperlihatkan:
  - Tata Ruang PTSP;
  - Kelengkapan Sarana Prasarana PTSP
  - Jam layanan;
  - Maklumat Pelayanan;
  - Standar Layanan;
  - Kompensasi Layanan;
  - Perangkat Survei;
  - Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;
  - Kompetensi Petugas PTSP;
  - *Banner* atau media lainnya terkait dengan “anti gratifikasi” dan “informasi pengaduan” di lokasi pelayanan publik; dan
  - Inovasi PTSP yang diunggulkan oleh Pengadilan.
- 2) Periode waktu pengunggahan video ke *Youtube* dimulai pada bulan **Februari** sampai dengan **15 Maret 2024**.

## b. Tahap 2 (Penilaian Lapangan)

Hal – hal yang akan dinilai dalam tahap ini :

- 1) *Screenshot* seluruh Standar Layanan yang sudah diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).
- 2) Laporan dan *screenshot* hasil pelaksanaan *briefing* oleh Pengawas yang ditunjuk melalui Surat keputusan Ketua Pengadilan (1 bulan terakhir).
- 3) Laporan bulanan hasil monev masing-masing penanggungjawab PTSP ke pejabat pengelola PTSP (6 bulan terakhir).
- 4) Surat Keputusan Ketua Pengadilan tentang pelaksana layanan PTSP.
- 5) Laporan bulanan hasil pengawasan oleh Pengawas PTSP kepada Ketua Pengadilan (6 bulan terakhir).
- 6) Hasil Survei (SPAK, SKM dan Survey Harian) serta tindak lanjut periode Tahun 2023 yang terpublikasi di website pengadilan.
- 7) Penerapan layanan di Mall Pelayanan Publik (jika ada).
- 8) Kebijakan / program kegiatan / inovasi yang terkait dengan peningkatan integritas Aparatur Pengadilan.
- 9) *Screenshot* bukti interaksi melalui media sosial Pengadilan (*Instagram, Facebook, X (twitter)*, dll), berupa postingan layanan Pengadilan maupun percakapan dengan pencari keadilan.
- 10) *Screenshot* nilai *google review* minimal 4 bintang dari skala 5 bintang.
- 11) Uraian inovasi layanan yang menjelaskan alasan adanya inovasi dan tujuan serta manfaat inovasi.
- 12) Sarana prasana / fasilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, yaitu antara lain:
  - Ruang Sidang Inklusi;
  - Form Identifikasi Awal / Penilaian Personal;
  - Loker / Antrian Prioritas;
  - Alat Bantu Jalan;
  - Lahan Parkir Disabilitas;
  - Kursi Tunggu Prioritas;
  - Toilet Khusus Disabilitas;
  - *Guiding Block* dan *Warning Block*;
  - *Ramp* / Jalur Landai;
  - Rambu / Papan Petunjuk Informatif;
  - Media / alat lainnya yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam menerima layanan di pengadilan.

- 13) Dokumen MoU Kerjasama dengan Lembaga Organisasi Penyandang Disabilitas.
- 14) Dokumentasi dan sertifikat pelatihan Petugas untuk memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas.
- 18) Dokumentasi Sosialisasi Buku Saku Panduan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- 19) Testimoni dari Penyandang Disabilitas yang telah menerima layanan dari pengadilan.
- 20) Penghargaan yang telah diraih dalam menerapkan layanan bagi penyandang disabilitas baik dari Mahkamah Agung ataupun instansi lainnya.

## **2. Penilaian Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara**

### **a. Tahap I**

Unsur yang dinilai pada penilaian Administrasi Perkara dan Administrasi Keuangan Perkara:

- 1) Kesesuaian Sinkronisasi Data Perkara melalui MIS;
- 2) Kesesuaian pelaksanaan monev per bulan (periode April 2023 sampai dengan Maret 2024) sesuai Surat Dirjen Badilum Nomor 352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan pengendalian Mutu data SIPP dan pengiriman laporan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tepat waktu;
- 3) Kesesuaian Pencatatan denda, Subsidair pidana dan data keuangan lainnya antara SIPP dan Putusan periode April 2023 sampai dengan Maret 2024;
- 4) Kesesuaian penginputan pada aplikasi pelaporan selalu tepat waktu dan sesuai periode April 2023 sampai dengan Maret 2024;
- 5) Kesesuaian penginputan SIPP: akurat, lengkap dan tepat waktu periode April 2023 sampai dengan Maret 2024;
- 6) Kesesuaian antara data keuangan perkara pada komdanas dengan dokumen sumber yang dikirimkan di aplikasi pelaporan periode April 2023 sampai dengan Maret 2024;

### **b. Tahap II**

Unsur yang dinilai pada penilaian Administrasi Perkara dan Administrasi Keuangan Perkara dengan melakukan evaluasi langsung di Pengadilan meliputi :

- 1) Kesesuaian kelengkapan dan penataan arsip berkas perkara, ketentuan peminjaman berkas dan kelengkapan sarana prasarana ruang arsip;
- 2) Kesesuaian Pengiriman berkas Upaya hukum;
- 3) Minutasi berkas perkara tepat waktu dan lengkap;
- 4) Kesesuaian pengunggahan dokumen elektronik : BAS, relaas, putusan, putusan anonim;
- 5) Kesesuaian dalam tertib pelaksanaan, pencatatan dan monitoring eksekusi;

- 6) Kesesuaian dalam tertib pengembalian dan pencatatan sisa panjar perkara;
- 7) Kesesuaian dalam pengawasan keuangan perkara;
- 8) Kesesuaian pengisian register induk keuangan dan jurnal pada SIPP.

### 3. Role Model Pimpinan

Untuk tingkat PN diusulkan oleh PT maksimal 3 orang pimpinan PN, dengan memperhatikan kriteria awal:

- a. Berintegritas
- b. Jiwa kepemimpinan;
- c. Responsif terhadap kebijakan Lembaga (sosialisasi dan tindaklanjuti);
- d. Inovatif;
- e. Kerjasama dan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal (POKJA pada MA/ Badilum/dll);
- f. Penghargaan yang diperoleh satker dibawah kepemimpinan calon Role Model (Sertifikasi/WBK/WBBM/SMAP/dll);
- g. Nilai – nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK,:
  - Berorientasi pelayanan;
  - Akuntabel;
  - Kompeten;
  - Harmonis;
  - Loyal;
  - Adaptif; dan
  - Kolaboratif.
- h. Cepat tanggap dan proaktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- i. Pencapaian nilai EIS;
- j. Berperan aktif dalam meningkatkan ketertiban administrasi perkara (Penyelesaian Perkara / Administrasi Perkara);
- k. Pelaksanaan eksekusi;
- l. Nilai survey IKM & IPAK;
- m. Ketepatan waktu pengiriman berkas upaya hukum (Banding, PK, Kasasi);
- n. Penerapan E-Register;

### 4. Role Model Panitera

Untuk tingkat PN diusulkan oleh PT maksimal 3 orang Panitera PN, dengan memperhatikan kriteria awal:

- a. Berintegritas
- b. Jiwa kepemimpinan;
- c. Inovatif;

- d. Responsif terhadap kebijakan lembaga yang berkaitan dengan administrasi perkara;
- e. Kerjasama dan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal;
- f. Pencapaian Nilai EIS (Oktober, November dan Desember 2023 serta Januari 2024);
- g. Ketepatan waktu pengiriman berkas upaya hukum (Banding, PK, Kasasi);
- h. Berperan aktif dalam memastikan ketertiban administrasi perkara (Penyelesaian Perkara / Administrasi Perkara);
- i. Cepat tanggap dan proaktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- j. Administrasi pelaksanaan eksekusi;
- k. Memastikan monitoring dan evaluasi ketertiban pelaporan keuangan perkara (termasuk pengembalian biaya panjar perkara) berjalan dengan baik;

## 5. Hakim Tinggi Pengawas Daerah

Masing-masing Pengadilan Tinggi mengusulkan 2 (dua) orang Hakim Tinggi Pengawas Daerah, dengan tahapan penilaian sebagai berikut:

- a. Penilaian tahap 1 pemahaman tugas dan fungsi Hatiwasda;
- b. Penilaian tahap 2 wawancara dengan Badan Pengawasan.

## 6. Penilaian Pelaksanaan E-Litigasi

Penilaian sepenuhnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan memperhatikan :

### a. Unsur penilaian kategori Pengadilan

- 1) Presentase upaya hukum yang dilakukan secara elektronik ;
- 2) Ketepatan waktu tanda tangan elektronik Salinan Putusan oleh Panitera;
- 3) Kepatuhan pemberitahuan putusan banding secara elektronik sesuai SOP;
- 4) Presentase kelengkapan bundel A dan bundel B berdasarkan verifikasi Pengadilan Tinggi.

### b. Unsur penilaian kategori Hakim

- 1) Validasi dokumen elektronik oleh majelis hakim;
- 2) Kepatuhan pengunggahan putusan secara elektronik;
- 3) Ketepatan waktu upload putusan pada hari yang sama dibacakan putusan secara elektronik;
- 4) Ketepatan waktu penyelesaian elitigasi sesuai *court calender*.

## 7. Pelaksanaan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu

### a. Posbakum

- 1) Kesesuaian pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014;
- 2) Inovasi yang dilaksanakan POSBAKUM pada Pengadilan Negeri yang diusulkan;
- 3) Publikasi dan sosialisasi inovasi POSBAKUM
- 4) Tersedia *banner*/brostur/pamflet/media informasi lainnya tentang :
  - a. Informasi layanan POSBAKUM bebas biaya;
  - b. Informasi jam layanan POSBAKUM;
  - c. Informasi daftar Advokat piket;
  - d. Informasi daftar organisasi LBH/Advokat yang memberikan bantuan hukum.
- 5) Proses seleksi LBH/Advokat pada POSBAKUM;
- 6) Pembinaan POSBAKUM oleh Panmud Hukum;
- 7) Laporan dan Monev setiap bulan (6 bulan terakhir);
- 8) Kepatuhan dalam penginputan laporan pada Aplikasi pelaporan Elektronik;
- 9) Pemahaman kewajiban dan larangan petugas posbakum dan aparat pengadilan (ketua, panitera, panmud) tentang POSBAKUM.

### b. Sidang diluar gedung pengadilan

- 1) Inovasi layanan hukum sidang diluar gedung pengadilan bagi masyarakat kurangmampu;
- 2) Publikasi dan sosialisasi layanan hukum sidang diluar gedung pengadilan kepada pihak internal maupun eksternal pada Pengadilan Negeri yang diusulkan;
- 3) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain;
- 4) Perencanaan pelaksanaan dan penganggaran;
- 5) Kepatuhan dalam penginputan laporan pada Aplikasi pelaporan Elektronik;
- 6) Ketepatan penginputan status sidang keliling pada SIPP;
- 7) Pemahaman aparat pengadilan tentang sidang di luar gedung pengadilan.

### c. Pembebasan Biaya Perkara

- 1) Inovasi yang dilakukan oleh PN untuk optimalisasi layanan hukum pembebasan biaya perkara bagi masyarakat kurang mampu;
- 2) Publikasi dan sosialisasi ke pihak eksternal / masyarakat maupun internal selain melalui PTSP oleh Pengadilan Negeri yang diusulkan;
- 3) Penganggaran / Rencana anggaran;
- 4) Monitoring dan evaluasi setiap bulan (6 bulan terakhir);
- 5) Kepatuhan dalam penginputan laporan pada Aplikasi pelaporan Elektronik;

6) Pemahaman aparat pengadilan tentang pembebasan biaya perkara.

Pengusulan untuk satuan kerja yang diikutsertakan dalam penilaian kinerja harus melalui seleksi Pengadilan Tinggi terlebih dahulu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Tinggi melakukan penilaian dengan indikator sebagaimana tersebut pada masing-masing penilaian kinerja.
- 2) Untuk penilaian kinerja layanan hukum satuan kerja yang diusulkan adalah yang memiliki anggaran Posbakum, Sidang di luar gedung Pengadilan dan pembebasan biaya perkara.
- 3) Pengusulan penilaian kinerja dilakukan **secara elektronik melalui link berikut tanpa harus mengirimkan usulan manual.**

No	Usulan	Link	Keterangan
1.	Pengusulan Satuan Kerja oleh Pengadilan Tinggi	<a href="http://bit.ly/penilaiankinerja_badilum_2024">bit.ly/penilaiankinerja_badilum_2024</a>	Diinput oleh PT
2.	Pengiriman Data Dukung Penilaian Layanan Pengadilan	<a href="http://bit.ly/kinerjaptsp_badilum_2024">bit.ly/kinerjaptsp_badilum_2024</a>	Diinput oleh PT
3.	Pengiriman Data Dukung Penilaian Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara	<a href="http://bit.ly/perkara_badilum_2024">bit.ly/perkara_badilum_2024</a>	Diinput oleh PT
4.	Pengiriman Data Dukung Penilaian Role Model Pimpinan	<a href="http://bit.ly/penilaian_rolemodel_pimpinan">bit.ly/penilaian_rolemodel_pimpinan</a>	Diinput oleh PT
5.	Pengiriman Data Dukung Penilaian Role Model Panitera	<a href="http://bit.ly/penilaian_rolemodel_panitera">bit.ly/penilaian_rolemodel_panitera</a>	Diinput oleh PT
6.	Pengiriman Data Dukung Penilaian Hatiwasda	<a href="http://bit.ly/penilaian_hatiwasda">http://bit.ly/penilaian_hatiwasda</a>	Diinput oleh PT
7.	Pengiriman Data Dukung Penilaian Layanan Hukum	<a href="http://bit.ly/kinerjalayananhukum_badilum_2024">bit.ly/kinerjalayananhukum_badilum_2024</a>	Diinput oleh PT



**Pengadilan Tinggi secara otomatis diikutsertakan dalam penilaian kinerja tersebut diatas kecuali e-litigasi dan layanan hukum.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada 13 Februari 2024

